

LAPORAN

Pembinaan SDM Pengawas
Pemilu dan Pemilihan



Tahun
2024

Divisi
Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Diklat

BAWASLU KABUPATEN REMBANG



KATA PENGANTAR

Rembang, 3 Februari 2025
Ketua

Totok Suparyanto, S.E., M.H., C.Med.

PROLOG PENYUSUN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, laporan ini menyajikan hasil evaluasi dan rekomendasi terkait pembinaan pengawas ad hoc di Kabupaten Rembang. Selama pelaksanaan pemilu, pengawasan yang efektif dan transparan sangat penting untuk memastikan integritas proses demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, "Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh seberapa banyak ia memberi kepada orang lain." Prinsip ini sejalan dengan tujuan pengawas pemilu, yang bertugas untuk melindungi hak suara masyarakat dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, semua kecamatan telah berhasil membentuk Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal pemahaman teknis dan koordinasi antar pengawas. Oleh karena itu, laporan ini menyarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ad hoc melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan keterampilan dalam penanganan pelanggaran. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara profesional dan responsif.

Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara pengawas di berbagai tingkat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan dan pemantauan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawas ad hoc dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Melalui pembinaan dan dukungan yang tepat, pengawas pemilu akan semakin siap menghadapi tantangan yang ada, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rembang dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

M. Dhofarul Muttaqiin
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Bawaslu Kabupaten Rembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang laporan pembinaan pengawas ad hoc ini berfokus pada pentingnya evaluasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rembang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, semua kecamatan telah berhasil membentuk Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan, diperlukan rekomendasi yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc, yang meliputi pelatihan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan dalam menangani pelanggaran.

Pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pengawas ad hoc tidak dapat diabaikan. Pelatihan tersebut harus mencakup pemahaman teknis tentang proses pemilihan serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menggunakan teknologi informasi untuk pelaporan pelanggaran. Dengan adanya pelatihan yang intensif, pengawas akan lebih siap menghadapi situasi di lapangan, termasuk dalam menangani pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi. Peningkatan keterampilan ini diharapkan dapat membantu pengawas dalam menyelesaikan masalah secara profesional dan efisien, sehingga menjaga integritas pemilu.

Selain peningkatan SDM, penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan juga menjadi aspek penting dalam laporan ini. Koordinasi yang efektif antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara holistik dan terintegrasi. Panwaslu Kecamatan harus memberikan informasi yang cukup kepada pengawas tingkat bawah agar mereka dapat melaporkan temuan dengan mudah. Penjelasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang setiap pengawas juga krusial untuk menghindari tumpang tindih dalam pengawasan, yang dapat mengurangi efektivitas keseluruhan sistem pengawasan.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan juga menjadi rekomendasi penting. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, pengawas dapat melaporkan temuan pelanggaran secara real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengawasan. Selain itu, prosedur penanganan pelanggaran yang jelas perlu disusun untuk memastikan bahwa pengawas ad hoc memiliki panduan yang tepat dalam menangani pelanggaran yang terjadi, baik administratif maupun hukum.

Akhirnya, pentingnya pembinaan SDM pengawas ad hoc tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengawas di berbagai tingkatan, serta pemahaman yang

mendalam tentang regulasi pemilu yang berlaku, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembinaan pengawas ad hoc di Kabupaten Rembang, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pembinaan pengawas ad hoc ini mencakup beberapa aspek penting yang berfokus pada evaluasi, rekomendasi, dan strategi peningkatan kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang. Pertama, laporan ini mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di semua kecamatan, yang menunjukkan bahwa pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengawasan, yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah mendatang.

Salah satu fokus utama dalam ruang lingkup laporan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Pelatihan berkelanjutan bagi pengawas, mulai dari tingkat TPS hingga kecamatan, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman teknis yang baik tentang proses pemilihan. Selain itu, pelatihan ini juga dirancang untuk membekali pengawas dengan keterampilan dalam menangani pelanggaran dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, pengawas akan lebih siap menghadapi situasi di lapangan, termasuk dalam penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu.

Penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan juga menjadi bagian penting dari ruang lingkup laporan ini. Koordinasi yang efektif antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan berlangsung secara holistik dan terintegrasi. Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan berperan untuk memastikan bahwa pengawas tingkat bawah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah. Kejelasan tugas dan wewenang setiap pengawas juga harus ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan.

Selain itu, laporan ini menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, pengawas dapat melaporkan temuan pelanggaran secara real-time, yang akan mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi informasi. Penggunaan teknologi diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan memastikan bahwa semua masalah yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan efisien. Prosedur penanganan pelanggaran yang jelas juga menjadi bagian dari rekomendasi untuk memastikan pengawas memiliki panduan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Akhirnya, pembinaan SDM pengawas ad hoc menjadi elemen strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pengawasan di tingkat lokal. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengawas di berbagai tingkatan, serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi pemilu, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Ruang lingkup laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan pemilu mendatang di Kabupaten Rembang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan pembinaan pengawas ad hoc ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan. Laporan ini berfokus pada evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pengawas di semua kecamatan, yang menunjukkan bahwa pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan penguatan dalam sistem pengawasan pemilu.

Salah satu tujuan utama dari laporan ini adalah untuk merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Dalam konteks ini, pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman teknis mengenai proses pemilihan, tetapi juga keterampilan dalam menangani pelanggaran dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan pelatihan yang intensif, pengawas diharapkan dapat menghadapi berbagai situasi di lapangan dengan lebih percaya diri dan profesional.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar tingkat pengawasan. Koordinasi yang baik antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat penting untuk memastikan pengawasan dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan wewenang masing-masing pengawas, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pengawasan, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu tujuan penting dalam laporan ini. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, pengawas dapat melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengawasan. Penerapan teknologi diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan meningkatkan responsivitas pengawas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Akhirnya, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur penanganan pelanggaran dan sengketa. Selama pelaksanaan pemilu, potensi pelanggaran selalu ada, sehingga pengawas ad hoc perlu dibekali dengan keterampilan dalam menangani sengketa yang mungkin terjadi. Dengan adanya prosedur yang jelas dan pelatihan yang memadai, pengawas diharapkan dapat menangani pelanggaran dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Pengantar

laporan pembinaan pengawas ad hoc ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang. Laporan ini dihasilkan dari evaluasi dan pengamatan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS di seluruh kecamatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembentukan struktur pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan landasan untuk pengembangan dan perbaikan sistem pengawasan ke depannya.

Salah satu fokus utama dari laporan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Dalam konteks ini, pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis mengenai proses pemilihan, tetapi juga keterampilan dalam menangani pelanggaran, berkomunikasi dengan masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan. Dengan pelatihan yang intensif, pengawas diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih percaya diri dan profesional.

Laporan ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan. Koordinasi yang efektif antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat penting untuk memastikan pengawasan dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawas di tingkat bawah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah. Kejelasan mengenai tugas dan wewenang masing-masing pengawas juga perlu ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan.

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam laporan ini. Memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring dapat mempercepat proses pelaporan dan pemantauan di lapangan. Dengan sistem pelaporan real-time, pengawas dapat melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan meningkatkan responsivitas pengawas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Akhirnya, laporan ini memberikan panduan mengenai prosedur penanganan pelanggaran dan sengketa yang mungkin muncul selama pemilu. Dengan adanya panduan yang jelas dan pelatihan yang memadai, pengawas diharapkan dapat menangani pelanggaran dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu dalam meningkatkan kualitas

pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

B. Gambaran Umum

Laporan pembinaan pengawas ad hoc ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang. Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, semua kecamatan telah berhasil membentuk Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini menunjukkan bahwa struktur pengawasan telah berfungsi dengan baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diimplementasikan untuk menyempurnakan sistem pengawasan dalam pemilu mendatang.

Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman teknis mengenai proses pemilihan, keterampilan dalam menangani pelanggaran, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan pelatihan yang lebih intensif, pengawas diharapkan dapat menghadapi berbagai situasi di lapangan dengan lebih percaya diri dan profesional.

Selain itu, penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan juga menjadi fokus penting dalam laporan ini. Koordinasi yang efektif antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan dilakukan secara holistik. Panwaslu Kecamatan harus memastikan bahwa pengawas di tingkat bawah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan.

Penggunaan teknologi informasi juga diidentifikasi sebagai salah satu cara untuk mempermudah pengawasan. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, proses pelaporan dan pemantauan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Pengawas ad hoc perlu dilengkapi dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi ini agar mereka dapat melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time, meningkatkan responsivitas pengawas terhadap isu yang muncul.

Akhirnya, laporan ini menyoroti pentingnya memiliki prosedur penanganan pelanggaran yang jelas. Selama pemilu, potensi pelanggaran selalu ada, sehingga pengawas ad hoc perlu memiliki panduan yang tepat untuk menangani pelanggaran dan sengketa yang terjadi. Dengan adanya pembinaan yang baik, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

BAB III

ISI LAPORAN

A. Pembinaan SDM Pengawas Pemilu 2024

1. Bimbingan Teknis

NO	KEGIATAN	ASAL PESERTA	MAKSUD DAN TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI
1	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Panwascam	Meningkatkan kemampuan Panwascam dalam menangani pelanggaran dan sengketa selama masa kampanye	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif dan adil
2	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan selama masa tenang	Minimalkan pelanggaran dan sengketa
3	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Logistik	Panwascam	Membekali Panwascam dengan pengetahuan terkait logistik pemilu	Penanganan masalah logistik yang lebih responsif
4	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Panwascam	Memastikan pemungutan suara dan penghitungan dilakukan sesuai regulasi	Peningkatan keakuratan hasil pemilu
5	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Panwascam	Membantu Panwascam dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu	Penetapan hasil yang transparan dan akuntabel
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menangani perkara pelanggaran	Penyelesaian perkara yang lebih profesional
7	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sekretariat	Meningkatkan kemampuan pengawasan lembaga Bawaslu	Pengawasan lembaga yang lebih efektif

8	Bimbingan Teknis Pengawasan Laporan Dana Kampanye	Panwascam	Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dana kampanye	Laporan dana kampanye yang akurat
9	Bimbingan Teknis Pengawasan Logistik	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan logistik pemilu	Penanganan logistik yang tepat sasaran
10	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Kampanye	Panwascam	Memperkuat pengawasan selama masa kampanye	Peningkatan kepatuhan peserta pemilu
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan tidak ada pelanggaran selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang
12	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan	Akurasi hasil pemungutan suara
13	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS	Panwascam	Memperkuat pengawasan pemungutan suara ulang	Penyelenggaraan suara ulang yang adil
14	Bimbingan Teknis Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam pengawasan hasil pemilu	Hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan
15	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Panwascam	Memastikan proses pengucapan sumpah janji dilakukan dengan benar	Legitimasi penyelenggaraan pemilu
16	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan barang bukti pelanggaran yang efisien	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif
17	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan barang milik Negara	Pengelolaan BMN yang lebih baik
18	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu	Sekretariat	Meningkatkan layanan informasi publik	Transparansi dalam informasi pemilu

	Kabupaten/Kota			
19	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Penanganan data pelanggaran yang efisien	Data akurat dan terintegrasi
20	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan data selama masa tenang	Pengawasan yang lebih efektif selama masa tenang
21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pengelolaan data pelanggaran	Data yang mudah diakses dan digunakan untuk evaluasi
22	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan data penanganan pelanggaran yang akurat	Memperkuat proses pemilihan umum
23	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip	Sistem kearsipan yang lebih teratur
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Memastikan dokumentasi dan publikasi yang baik	Meningkatkan publikasi dan transparansi kegiatan
25	Bimbingan Teknis Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan manajemen administrasi dan kearsipan	Meningkatkan efisiensi administrasi Bawaslu

Tabel 3. 1 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

PERIODE SERENTAK
14 FEBRUARI 2024

ARYO AWASI BERSAMA

BAWASLU KABUPATEN REMBANG NEWS

Bawaslu Kabupaten Rembang mengikuti acara "Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Rembang" yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, Kamis (7/9).



Bawaslu Kab Rembang @bawaslu_rembang Bawaslu Rembang https://rembang.bawaslu.go.id BawasluRembang

Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Rembang

2. Penyediaan Wadah Konsultasi

NO	PANWASCA M YANG BERKONSULTASI	MATERI KONSULTASI	MAKSUD DAN TUJUAN	REKOMENDASI
1	Sumber	Konsultasi terkait profesi pendaftar PTPS	Memastikan bahwa pendaftar PTPS tidak memiliki profesi yang dilarang.	Mengharuskan pendaftar PTPS berasal dari profesi yang tidak terlarang, seperti non-pejabat negara.
2	Sarang	Konsultasi terkait	Menentukan	Mengharuskan

		pendidikan minimal	standar pendidikan bagi pendaftar PTPS.	pendaftar untuk memiliki pendidikan minimal sederajat. SMA
3	Kragan	Konsultasi terkait pendaftar perempuan PTPS	Memotivasi partisipasi perempuan dalam pendaftaran PTPS.	Mendorong keterlibatan perempuan sebagai pendaftar PTPS di setiap desa.
4	Sedan	Konsultasi terkait kebutuhan dua kali pendaftaran PTPS	Memastikan kecukupan jumlah pendaftar untuk kebutuhan pemilihan.	Mengoptimalkan dua kali pendaftaran PTPS dalam satu desa untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 3. 2 Daftar Kegiatan Konsultasi yang dilakukan Panwascam

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO	MATERI PENINGKATAN KAPASITAS	ASAL PESERTA	MAKSUD DAN TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur dalam pemilu di tingkat kabupaten/kota	Pengawasan yang lebih efektif dan efisien
2	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Panwascam	Memperkuat kemampuan pengawasan di tingkat kecamatan	Pengawasan yang tepat di tingkat kecamatan
3	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pada tingkat	Penanganan pelanggaran yang lebih responsif

			kabupaten/kota	
4	Peningkatan kapasitas dan pembinaan penyelesaian sengketa	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa	Penyelesaian sengketa yang lebih efektif
5	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan	Panwascam	Memperkuat perencanaan dan penganggaran yang efisien dalam pengawasan pemilu	Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel
6	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Membekali pengetahuan tentang cara pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran logistik	Pengelolaan barang bukti yang efisien
7	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat	Panwascam	Meningkatkan kemampuan administrasi dan integrasi antara sekretariat dan lembaga	Administrasi yang lebih terkoordinasi
8	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan Pengawas D/K dalam pengawasan tahapan pemilu	Panwascam	Meningkatkan sinergi dalam pengawasan yang melibatkan semua pihak	Pengawasan tahapan pemilu yang lebih terarah
9	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan struktur kelembagaan Bawaslu untuk lebih efektif dalam menjalankan	Kelembagaan yang lebih kuat dan mandiri

			tugasnya	
10	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota	Penguatan institusi yang lebih efisien
11	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Mengembangkan kemampuan untuk menangani pelanggaran dalam logistik pemilu	Penanganan pelanggaran logistik yang lebih responsif
12	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pemahaman dan penanganan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye	Pengawasan masa kampanye yang lebih baik
13	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan yang lebih baik selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang
14	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam menangani pelanggaran terkait pemungutan suara	Pemungutan suara yang transparan dan akuntabel
15	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan penanganan pelanggaran hasil pemilu yang lebih efektif	Hasil pemilu yang legit dan dapat dipertanggungjawabkan
16	Peningkatan kapasitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	Panwascam	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder	Penertiban yang lebih baik dan efektif

			untuk menertibkan alat peraga kampanye	
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi dalam sektor keuangan dan karsipan	Sistem administrasi yang lebih teratur
18	Peningkatan kapasitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Penguatan layanan hukum agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum pemilu	Penyelesaian hukum yang lebih baik
19	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Panwascam	Meningkatkan akses dan pemahaman terhadap hak-hak pemilih disabilitas	Kesetaraan akses pemilu bagi disabilitas
20	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pengetahuan dan partisipasi pemilih disabilitas	Partisipasi disabilitas yang meningkat
21	Peningkatan kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu	Penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien
22	Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU	Panwascam	Meningkatkan pemahaman tentang proses dan penyampaian di sidang PHPU	Kesiapan menghadiri dan mengelola sidang
23	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam	Penyelesaian perselisihan yang akurat

			menangani perselisihan hasil pemilu	
24	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pemahaman dan penanganan perselisihan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota	Hasil pemilu yang lebih dapat diakui
25	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Panwascam	Meningkatkan perhatian pada perselisihan hasil di tingkat kecamatan	Proses yang lebih transparan
26	Peningkatan kapasitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan dan penanganan hukum di tahapan logistik	Pengelolaan logistik yang lebih transparan

Tabel 3. 3 Daftar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan acara "Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu" yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, Selasa (28/11).



Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan Rapat Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan dengan pengambilan tiga zona di Kabupaten Rembang, Selasa (17/10) hingga Kamis (19/10).



Bawaslu Kab Rembang @bawaslu_rembang Bawaslu Rembang https://rembang.bawaslu.go.id BawasluRembang

Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang

4. Fasilitasi

NO	KELOMPOK PESERTA	MATERI FASILITASI	MAKSUD	HASIL YANG DICAPAI
1	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran	Meningkatkan kemampuan dalam menangani pelanggaran pemilu	Penanganan pelanggaran pemilu yang lebih efektif
2	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Memastikan pengelolaan barang bukti yang akurat dan transparan	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang lebih baik
3	Saksi Peserta Pemilu	Fasilitasi pelatihan saksi parpol/Tim Kampanye	Meningkatkan pemahaman saksi tentang tugas dan tanggung jawab mereka	Saksi yang lebih siap dan berkualitas dalam pemilu
4	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan aparatur	Meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam	Penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib dan transparan

		administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	pengawasan	
5	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu agar lebih efektif	Kelembagaan Bawaslu yang lebih kuat dan mandiri
6	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektivitas layanan hukum dalam mendukung aktivitas Bawaslu	Layanan hukum yang lebih responsif dan berkualitas
7	Kelompok disabilitas	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman hak pemilih disabilitas	Partisipasi pemilih disabilitas yang lebih meningkat
8	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Memperkuat prosedur dalam penyelesaian sengketa untuk meningkatkan integritas	Sengketa yang diselesaikan secara adil dan transparan
9	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Meningkatkan pengawasan terhadap logistik pemilu dalam proses penyelenggaraan	Proses logistik yang lebih efisien dan tepat
10	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Memastikan pengawasan efektif selama masa kampanye	Kampanye berlangsung adil dan sesuai dengan regulasi
11	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pemutakhiran	Meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih	Daftar pemilih yang akurat dan valid

		Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		
12	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD	Mengawasi dan memastikan proses pencalonan yang adil	Proses pencalonan yang transparan dan akuntabel
13	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat koordinasi dan sistem pelaporan untuk pengawasan	Laporan yang lebih akurat dan tepat waktu

Tabel 3. 4 Daftar Fasilitasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan Sosialisasi Pengawas Partisipatif Kelompok Sasaran Disabilitas yang diselenggarakan di Home Audio Sanggar Budaya komplek area Musium Kartini, pada Jum'at (20/10).



Bawaslu Kab Rembang @bawaslu_rembang Bawaslu Rembang https://rembang.bawaslu.go.id BawasluRembang

Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas Di Ruang Audio Sanggar Budaya Rembang

B. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

NO	NAMA KECAMATAN	MAKSUD DAN TUJUAN	TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Sumber	Supervisi implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu	Beberapa peraturan Bawaslu belum diimplementasikan dengan baik	Penyuluhan dan pelatihan untuk Panwascam
2	Kragan	Supervisi keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024	Ketersediaan Pendaftar pengawas TPS belum optimal	Sosialisasi Perekrutan pengawas TPS
3	Sluke	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Mengadakan forum dialog untuk masyarakat
4	Sale	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Pemahaman masyarakat rendah terhadap peraturan	Pelatihan lanjutan dan sosialisasi lebih intensif
5	Lasem	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye	Ada info kampanye tidak mengikuti ketentuan yang berlaku	Dilakukan Upaya pencegahan aturan
6	Kragan	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Ulang	Terdapat 3 TPS yang PSU	Pendampingan pengawasan
7	Pancur	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Tidak adanya ketersediaan saksi pada saat penghitungan	Memastikan saksi yang hadir bermandat
8	Sulang	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Kampanye	Beberapa pelanggaran kampanye pemasangan APK teridentifikasi	Tindakan tegas terhadap pelanggaran
9	Sarang	Supervisi dan Monitoring Sengketa Proses Pemilu	Terdapat potensi sengketa proses	Penyiapan SDM

10	Kaliori	Supervisi Kehumasan Kecamatan ke	Keterbatasan komunikasi dengan masyarakat	Meningkatkan saluran komunikasi dan informasi
11	Bulu	Supervisi Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan	Dugaan pelanggaran dari laporan	Klarifikasi
12	Sumber	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye	Ada informasi Tindakan pelanggaran	Klarifikasi dan pengumpulan data
13	Rembang	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Logistik	Penyimpanan logistik kurang aman	Peningkatan keamanan dalam pengelolaan logistik
14	Gunem	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Masa Tenang	Beberapa alat peraga Kampanye masih terpasang	Penegakan aturan tentang alat peraga kampanye
15	Lasem	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Laporan hasil Pemilu	Klarifikasi
16	Sedan	Supervisi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) ke Kecamatan	Sengketa antara peserta pemilu	Mediasi untuk menyelesaikan sengketa

Tabel 3. 5 Daftar Superfisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

2) Pemantauan

NO	KECAMATAN	MATERI	TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Kaliori	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan seleksi PPS	Seleksi PPS berjalan baik	Rutin memonitor proses seleksi untuk memastikan kualitas
2	Rembang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan seleksi Pantarlih	Seleksi Pantarlih sesuai aturan	Pembinaan lanjutan bagi Pantarlih
3	Lasem	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Penyusunan data pemilih	Penyusunan daftar pemilih taat regulasi	Sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan regulasi
4	Pancur	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan penetapan data Pemilih	Penetapan data Pemilih sesuai waktu	Verifikasi berkala terhadap data pemilih
5	Pamotan	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Kampanye	Kampanye berjalan sesuai aturan	Evaluasi efektivitas kampanye dan umpan balik
6	Sluke	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Kampanye (Pemasangan APK)	Pemasangan APK sesuai imbauan Panwas	Peningkatan komunikasi peraturan kepada peserta kampanye
7	Kragan	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Masa tenang	Masa tenang dapat ditaati peserta	Pendidikan lanjutan tentang pentingnya masa tenang
8	Sarang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pendirian TPS	Pendirian TPS sesuai aturan	Peninjauan lokasi TPS secara berkala
9	Sedan	Pemantauan kinerja	Distribusi logistik tepat	Peningkatan koordinasi dengan

		Pengawasan tahapan Distribusi logistik		pihak logistik
10	Sale	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan penyimpanan logistik	Penyimpanan logistik sesuai	Rencana cadangan untuk keamanan penyimpanan
11	Gunem	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Pelatihan tambahan untuk petugas penghitungan
12	Sulang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Peningkatan integritas penghitungan suara
13	Bulu	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Penguatan proses audit hasil pemungutan suara
14	Sumber	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Rekapitulasi	Rekapitulasi berjalan sesuai regulasi	Pelaporan hasil rekapitulasi yang lebih transparan

Tabel 3. 6 Daftar Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ke Panwascam

Sumber : Jurnal SDM BAwashu Kabupaten Rembang

3) Inspeksi Mendadak

NO	KECAMATAN	MATERI	TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Pamotan	Inspeksi Pengawasan tahapan Kampanye	Kampanye berjalan sesuai aturan	Evaluasi efektivitas kampanye dan umpan balik
2	Sluke	Inspeksi Pengawasan tahapan Kampanye (Pemasangan)	Pemasangan APK sesuai imbauan Panwas	Peningkatan komunikasi peraturan kepada peserta kampanye

		APK)		
3	Kragan	Inspeksi Pengawasan tahapan Masa tenang	Masa tenang dapat ditaati peserta	Pendidikan lanjutan tentang pentingnya masa tenang
4	Sarang	Inspeksi Pengawasan tahapan Pendirian TPS	Pendirian TPS sesuai aturan	Peninjauan lokasi TPS secara berkala
5	Kaliori	Inspeksi Pengawasan tahapan seleksi PPS	Seleksi PPS berjalan baik	Rutin memonitor proses seleksi untuk memastikan kualitas
6	Rembang	Inspeksi Pengawasan tahapan seleksi Pantarlih	Seleksi Pantarlih sesuai aturan	Pembinaan lanjutan bagi Pantarlih
7	Lasem	Inspeksi Pengawasan tahapan Penyusunan daftar pemilih	Penyusunan daftar pemilih taat regulasi	Sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan regulasi
8	Pancur	Inspeksi Pengawasan tahapan penetapan data Pemilih	Penetapan data Pemilih sesuai waktu	Verifikasi berkala terhadap data pemilih
9	Sedan	Inspeksi Pengawasan tahapan Distribusi logistik	Distribusi logistik tepat	Peningkatan koordinasi dengan pihak logistik
10	Sale	Inspeksi Pengawasan tahapan penyimpanan logistik	Penyimpanan logistik sesuai	Rencana cadangan untuk keamanan penyimpanan
11	Gunem	Inspeksi Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Pelatihan tambahan untuk petugas penghitungan

12	Sulang	Inspeksi Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Peningkatan integritas penghitungan suara
13	Bulu	Inspeksi Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Penguatan proses audit hasil pemungutan suara
14	Sumber	Inspeksi Pengawasan tahapan Rekapitulasi	Rekapitulasi berjalan sesuai regulasi	Pelaporan hasil rekapitulasi yang lebih transparan

Tabel 3. 7 Daftar Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ke Kantor Sekretariat Panwascam

Sumber : Jurnal SDM BAwaslu Kabupaten Rembang

C. Pembinaan SDM Pengawas Pemilihan 2024

Berikut adalah bentuk kerja-kerja pembinaan yang dilakukan oleh beberapa Panwaslu Kecamatan:

1. Pembinaan Kepada Panwaslu Desa/Kelurahan

a. Panwaslu Kecamatan Sumber

NO	TANGGAL & TEMPAT KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Tanggal 13 – 24 Juni 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	Panwaslu seKecamatan Sumber dapat memastikan Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi, Penetapan Hasil Seleksi, dan Pelantikan Pantarlih sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
2	Tanggal 31 Mei - 23 September 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan proses Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	Panwaslu seKecamatan Sumber dapat memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi hak pilih masyarakat.

3	Tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih	Panwaslu seKecamatan Sumber dapat memastikan bahwa kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
4	Tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan valid dan akurat sesuai kondisi di lapangan.
5	Tanggal 25 Juli – 25 Agustus 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
6	Tanggal 25 Juli – 25 Agustus 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
7	Tanggal 26 Agustus – 26 September 2024) di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
8	Tanggal 27 Oktober - 27 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan prosedur dan pertauran yang berlaku.
9	Tanggal 27 Oktober - 27 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan secara seksama dan memuat data actual di lapangan.
10	Tanggal 17	Rapat Koordinasi	Panwaslu Kelurahan/Desa

	September - 7 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	(Bimtek) Pengawasan proses Pembentukan KPPS	seKecamatan Sumber dapat memastikan proses Pengumuman Pendaftaran, Penerimaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi, Penetapan Hasil Seleksi, dan Pelantikan KPPS sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
11	Tanggal 25 September - 23 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Sumber	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Sumber sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
12	Tanggal 24 November 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Inventarisasi dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	Panwaslu Kecamatan Sumber dapat Inventarisasi dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang melanggar ataupun tidak melanggar peraturan yang berlaku.
13	Tanggal 24 – 26 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Masa Tenang	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan tidak ada potensi dan kerawanan pelanggaran di Masa Tenang
14	Tanggal 26 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pelaksanaan Patroli dan Monitoring Kesiapan TPS	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan TPS memadai, aman, dan bebas dari potensi atau kerawanan pelanggaran dan bencana alam.
15	Tanggal 27 November 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan Sumber	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan Pelaksanaan pemungutan suara	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
16	Tanggal 27 November - 16 Desember 2024, di Kantor Panwaslu	Rapat Koordinasi (Bimtek) Pengawasan kegiatan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dapat memastikan kegiatan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan

	Kecamatan Sumber		peraturan yang berlaku.
17	Tanggal 6 Januari 2025, di Balai Kecamatan Sumber	Evaluasi Kinerja Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Panwaslu Kelurahan/Desa seKecamatan Sumber dalam meganalisis hambatan, tantangan, dan rekomendasi kinerja pengawasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Desa masing-masing.

Tabel 5. 1 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber



Rapat Koordinasi Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber

b. Panwaslu Kecamatan Bulu

NO	TANGGAL & TEMPAT KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	02 Juni 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Bimbingan teknis	Dipahaminya tugas dan wewenang PKD dan tata kelola
2	23 Juni 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Bimbingan teknis dan rapat koordinasi	Dipahaminya teknis pengawasan penyusunan daftar pemilih
3	28 Juli 2024 di kantor panwascam Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman alat kerja pengawasan
4	18 Agustus 2024 di pendopo kecamatan Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan

5	2 September 2024 di pendodo kecamatan Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan
6	14 September 2024 di ruang PPK Bulu	Rapat koordinasi dan penyediaan wadah konsultasi	Pemahaman teknis dan alat kerja pengawasan
7	12 Oktober 2024 di pendopo kec. Bulu	Rapat koordinasi PKD bersama PPS	Penyamaan persepsi
8	30 Oktober 2024 di Rumah makan Srawung	Bimbingan Teknis dan RKTL	Pemahaman aplikasi SIAPPP
9	03 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan
10	5 November 2024 di beberapa titik di kec. Bulu	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih registrasi serentak
11	10 November 2024 di area wisata makam kartini	Bimtek peningkatan kapastitas	Terbentuknya mental pengawas yang tegas
12	14 November 2024 di cafe Hard work	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih uji coba secara serentak
13	17 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pemungutan sura dan pengawasannya
14	23 November 2024 di RM. Ria Sulang	Bimbingan teknis penertiban APK	Pehamanan teknis penertiban APK dan pengisian alat kerja
15	24 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan hari tenang dan pelaporan hasil pengawasan pemungutan suara
16	25 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan Teknis dan rapat kooedinasni	Pemantapan kelengkapan berkas laporan hasil pemungutan suara
17	Selama tahapan berlangsung	Monitoring, pendampingan ke lapangan dan layanan konsultasi	Terjalin komunikasi yang baik

Tabel 5. 2 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu

2. Pembinaan Kepada Pangawas TPS

a. Panwaslu Kecamatan Sumber

NO	TANGGAL & TEMPAT KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Tanggal 3 November 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber.	Pembekalan Meteri Pengawas TPS pada Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber.	Pengawas TPS mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2	Tanggal 10 November 2024, di Lapangan Sumber.	Penguatan Mental Pengawas TPS Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber.	Pengawas TPS memiliki mental yang kuat dalam Pengawasan Pemilihan 2024.
3	Tanggal 20 November 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber.	Bimtek Tahapan Pelaporan Pengawasan PTPS dalam Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber.	Pengawas TPS mengetahui tahapan, system, dan objek pengawasan TPS dalam Pemilihan 2024 di TPS.
4	Tanggal 25 November 2024 di Rumah Makan Tirta Wening Desa Sumber Kecamatan Sumber	Rapat Kerja Teknis Kesiapan Pengawasan TPS dalam Pemilihan 2024 di Kecamatan Sumber	Pengawas TPS mengetahui prosedur penyusunan Form.A Pengawasan pra, proses, dan pasca pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan 2024 di TPS bertugas.
5	Tanggal 16 Desember 2024, di Pendopo Kecamatan Sumber	Evaluasi Kinerja Pengawasan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak 2024.	Pengawas TPS di Kecamatan Sumber dalam menganalisis hambatan, tantangan, dan rekomendasi kinerja pengawasan dalam Pemilihan 2024 di TPS masing-masing.

Tabel 5. 3 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Sumber kepada Panwaslu

Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber

Evaluasi Kinerja Pengawasan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak 2024



b. Panwaslu Kecamatan Bulu

No	Tanggal & Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	03 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan
2	5 November 2024 di beberapa titik di kec. Bulu	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih registrasi serentak
3	10 November 2024 di area wisata makam kartini	Bimtek peningkatan kapastitas	Penanaman nilai-nilai integritas
4	14 November 2024 di cafe Hard work	Bimbingan teknis dan pendampingan	Penggunaan aplikasi siwaslih uji coba secara serentak
5	17 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pemungutan sura dan pengawasannya
7	23 November 2024 di RM. Ria Sulang	Bimbingan teknis penertiban APK	Pehamanan teknis penertiban APK dan pengisian alat kerja
7	24 November 2024 di pendopo kec. Bulu	Bimbingan teknis	Pemahaman teknis pengawasan hari tenang dan pelaporan hasil pengawasan pemungutan suara
8	26 November 2024	Monitoring dan pendampingan	Mendorong PTPS untuk lebih bersemangat dalam pengawasan

Tabel 5. 4 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Bulu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bulu



monitoring pengawasan pemungutan suara

3. Pembinaan Kepada Gabungan Pwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS Panwaslu Kecamatan Gunem

1	<p>Tanggal : Sabtu, 08 Juni 2024</p> <p>. Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pembentukan Pantarlih</p> <p>Hasil Kegiatan : Memastikan proses rekrutmen pantarlih dilakukan secara transparan, akuntabel. Serta pantarlih memenuhi syarat.</p>
2	<p>Tanggal : Minggu, 23 Juni 2024</p> <p>. Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Coklit</p> <p>Hasil kegiatan : Memastikan bahwa proses coklit berjalan dengan baik, data pemilih yang tercatat akurat, dan tidak ada pelanggaran yang mengarah pada ketidak beresan dalam tahapan Pemilu selanjutnya. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Hasil rapat tersebut kemudian biasanya dijadikan pedoman dan acuan untuk pelaksanaan pengawasan coklit di lapangan, serta untuk melakukan tindak lanjut jika ditemukan kendala atau permasalahan.</p>
3	<p>Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024</p> <p>. Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Pengawasan DPS</p> <p>Hasil kegiatan : Memastikan bahwa proses penyusunan dan pengawasan terhadap DPS berlangsung dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan DPS sangat penting untuk memastikan kualitas daftar pemilih dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan), sehingga hanya pemilih yang sah yang terdaftar. Pembagian wilayah pengawasan DPS secara rinci, termasuk pembagian tugas antara pengawas di tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Penyusunan peta pengawasan yang menggambarkan distribusi wilayah yang menjadi fokus pengawasan, termasuk titik rawan atau daerah dengan potensi masalah yang lebih besar. Penjelasan teknis mengenai prosedur pengawasan terhadap DPS, seperti pengecekan kesesuaian data pemilih, pemilih yang terdaftar ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Penguatan pemahaman terkait mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang perlu dilakukan jika terdapat masalah dalam data pemilih, serta prosedur laporan hasil pengawasan</p>
4	<p>Tanggal : Rabu, 25 September 2024</p> <p>. Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi PPD dan PPS se-Kecamatan Gunem</p> <p>Hasil kegiatan : Penjelasan mengenai tugas PPD dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit), memastikan data pemilih yang terdaftar valid dan akurat, serta menangani masalah seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Penguatan</p>

	<p>hubungan koordinasi antara PPD dan PPS di tingkat kecamatan, karena keduanya memiliki peran yang saling terkait, khususnya dalam pencocokan data pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Pembagian tugas di tingkat kecamatan dan desa, dengan menugaskan PPD untuk melakukan pemutakhiran data di setiap wilayah yang lebih kecil, seperti RT/RW, dan memastikan keberhasilan Coklit. Rapat Koordinasi PPD dan PPS se-Kecamatan Gunem bertujuan untuk mempersiapkan dengan baik seluruh tahapan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara. Koordinasi yang solid antara PPD dan PPS sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, data pemilih yang digunakan akurat dan bebas dari kesalahan, serta pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dengan penyusunan tugas yang jelas, pengawasan yang tepat, serta evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis, diharapkan tidak akan ada kesalahan yang signifikan dalam pencocokan data pemilih, dan seluruh masyarakat di Kecamatan Gunem bisa memastikan hak pilih mereka tercatat dengan benar.</p>
5	<p>Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024 Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Hasil kegiatan : Rapat koordinasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan yang jelas terkait semua aspek yang dibutuhkan untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara. Semua peserta rapat menyepakati bahwa persiapan logistik, pembagian tugas, pengamanan, dan mekanisme perhitungan suara akan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan proses pemilihan berjalan aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pihak terkait diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga integritas selama seluruh tahapan pemilu. Rapat koordinasi yang mencakup semua aspek penting dalam persiapan pemungutan dan perhitungan suara. Semua keputusan yang diambil diharapkan dapat memastikan kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan.</p>
6	<p>Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024 Tempat Kegiatan : Kantor Panwaslu Kecamatan Gunem Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan dan Pembekalan PTPS & SIWASLIH Hasil kegiatan :<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman PTPS tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengawasan di TPS. • Memberikan pengetahuan teknis tentang penggunaan aplikasi SIWASLIH untuk mempermudah pelaporan dan monitoring. • Mempersiapkan PTPS untuk menghadapi potensi pelanggaran dan kendala selama proses pemungutan dan penghitungan suara. • Memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai peraturan Mengawasi </p>

	<ul style="list-style-type: none"> proses penghitungan suara dan pengiriman hasil ke tingkat selanjutnya. Melaporkan pelanggaran atau indikasi pelanggaran secara real-time melalui SIWASLIH Cara login, pengisian laporan, dan pengunggahan dokumen atau bukti digital. Memastikan data yang diinput akurat dan valid.Strategi pencegahan dan penanganan langsung di lapangan. Memberikan simulasi praktis bagaimana menangani laporan pelanggaran menggunakan aplikasi. Menjelaskan cara menyikapi kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau aplikasi. Mengumpulkan masukan untuk penyempurnaan sistem SIWASLIH dan mekanisme kerja PTPS di masa mendatang. PTPS dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan mengoptimalkan teknologi SIWASLIH. Sehingga terwujudnya pengawasan TPS yang lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
7	<p>Tanggal : Minggu, 17 November 2024</p> <p>Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan3 Gunem</p> <p>Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara PPD & PTPS Se-Kecamatan Gunem</p> <p>Hasil kegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk Panitia Pengawas Desa (PPD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Gunem merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan selama proses pemilu. Berikut pembahasan yang dapat menjadi fokus dalam rapat tersebut:</p> <p>a) Tujuan Rapat Koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi Tugas: Menyamakan persepsi dan langkah kerja antara PPD dan PTPS untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Pemetaan Potensi Masalah: Mengidentifikasi potensi pelanggaran atau hambatan di TPS maupun tingkat desa. Peningkatan Kapasitas: Membekali PPD dan PTPS dengan panduan teknis serta pemahaman regulasi terbaru terkait pengawasan pemilu. Penyusunan Strategi: Merumuskan langkah antisipasi dan penanganan jika terjadi pelanggaran atau insiden di lapangan. <p>b) Agenda Utama dalam Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Tugas dan Fungsi PPD: Mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat desa.Membantu PTPS dalam pelaporan dan koordinasi ke Panwaslu Kecamatan. PTPS: Mengawasi proses di TPS, termasuk pemungutan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil. Melaporkan setiap pelanggaran secara langsung melalui SIWASLIH.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Wilayah Pengawasan : Menentukan distribusi tugas dan wilayah kerja antara PPD dan PTPS. Mengidentifikasi TPS rawan pelanggaran, seperti potensi money politics, intimidasi pemilih, atau konflik antar pendukung. • Penggunaan Aplikasi SIWASLIH : Demonstrasi teknis pengisian laporan melalui SIWASLIH. Penjelasan mekanisme pelaporan cepat jika terjadi pelanggaran atau insiden mendesak. Simulasi pelaporan berbasis kasus nyata. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran • Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di TPS: Pemilih ganda atau tidak terdaftar. Intervensi dari pihak tertentu terhadap penyelenggara pemilu. Penggelembungan suara atau pengurangan suara kandidat. Strategi pencegahan, seperti: Memperketat pengawasan di TPS rawan. Membina hubungan baik dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). • Simulasi Situasi Lapangan : Latihan menghadapi situasi sulit, seperti konflik di TPS atau protes saksi. Koordinasi penanganan cepat antara PTPS, PPD, dan Panwaslu Kecamatan. <p>c) Tantangan yang Dibahas : Kendala dalam pengoperasian SIWASLIH atau perangkat, Aksesibilitas ke TPS terpencil dan tekanan dari pihak tertentu, termasuk calon atau pendukungnya. Konflik antar pemilih yang bisa memengaruhi jalannya proses di TPS.</p> <p>d) Evaluasi Persiapan : Memastikan semua PPD dan PTPS memahami peraturan terbaru. Menyediakan kontak darurat untuk koordinasi selama hari pemungutan dan penghitungan suara. Mengecek kesiapan logistik seperti formulir pelaporan, perangkat komunikasi, dan ID petugas.</p> <p>e) Hasil yang Diharapkan : Terwujudnya sinergi antara PPD dan PTPS untuk pengawasan yang optimal. Penanganan pelanggaran dan kendala di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Kecamatan Gunem.</p>
--	---

Tabel 5. 5 Jadwal Pembinaan oleh Panwaslu Kecamatan Gunem kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Gunem



Proses pembekalan diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara Pengawas Desa dan Pengawas TPS. Sinergi antara keduanya penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilihan berjalan lancar. Dengan pembekalan yang sama,

mereka dapat berbagi pengalaman dan wawasan, sehingga dapat memperkuat jaringan pengawasan dan koordinasi di antara mereka. Serta evaluasi yang dilakukan setelah pemungutan suara merupakan langkah penting untuk menjaga integritas hasil pemilihan. Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, Pengawas Desa dan Pengawas TPS dapat diingatkan tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas proses pemilihan yang adil dan transparan. Hal ini juga bisa mendorong pengawas untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran secara akurat.

Dalam rangka suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, harapan untuk diadakannya pembekalan dan evaluasi kepada Pengawas Desa dan Pengawas TPS sangatlah penting. Melalui pembekalan yang memadai, mereka dapat meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi tugas pengawasan yang krusial. Evaluasi pasca pemilihan akan memastikan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan proses pemilihan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, kita semua berharap agar Pemilihan 2024 ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat dan Negara.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Laporan pembinaan pengawas ad hoc di Kabupaten Rembang menunjukkan hasil evaluasi yang positif terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Semua kecamatan telah berhasil membentuk Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Namun, meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur pengawasan berjalan dengan baik, masih ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Salah satu rekomendasi utama yang diidentifikasi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Pelatihan berkelanjutan sangat penting bagi pengawas, mulai dari pengawas TPS hingga pengawas kelurahan/desa dan kecamatan. Pelatihan tersebut tidak hanya harus mencakup pemahaman teknis mengenai proses pemilihan, tetapi juga keterampilan dalam menangani pelanggaran, berkomunikasi dengan masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan. Dengan pelatihan yang lebih intensif, pengawas diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan dengan lebih percaya diri dan profesional.

Penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan juga menjadi fokus penting dalam evaluasi ini. Koordinasi yang baik antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat diperlukan agar pengawasan dapat berlangsung secara holistik. Panwaslu Kecamatan harus memastikan bahwa pengawas di tingkat bawah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah. Selain itu, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai tugas dan wewenang masing-masing pengawas untuk menghindari tumpang tindih dalam pengawasan.

Penggunaan teknologi informasi telah diidentifikasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, proses pelaporan dan pemantauan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Pengawas ad hoc perlu dilengkapi dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi ini agar mereka dapat melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time, yang akan meningkatkan responsivitas pengawas terhadap isu yang muncul.

B. Rekomendasi

Rekomendasi laporan pembinaan pengawas ad hoc di Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pertama-tama, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas ad hoc. Pelatihan berkelanjutan harus diadakan untuk semua pengawas, mulai dari pengawas TPS hingga pengawas kelurahan/desa dan kecamatan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman teknis tentang proses pemilihan, keterampilan menangani pelanggaran, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, pengawas juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan pelanggaran secara akurat.

Rekomendasi kedua adalah penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan. Koordinasi yang baik antara pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan secara holistik dan terintegrasi. Panwaslu Kecamatan harus memastikan bahwa pengawas di tingkat bawah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah. Selain itu, perlu adanya penjelasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang setiap pengawas untuk menghindari tumpang tindih dalam pengawasan.

Penggunaan teknologi informasi merupakan rekomendasi ketiga yang dapat mempercepat proses pelaporan dan pemantauan di lapangan. Dengan memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis daring, pengawas dapat melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan teknologi ini juga perlu dimasukkan dalam program pembinaan SDM pengawas.

Rekomendasi keempat berkaitan dengan peningkatan penanganan pelanggaran dan sengketa. Pengawas ad hoc perlu memiliki panduan yang jelas tentang cara menangani pelanggaran yang terjadi, baik administratif maupun hukum. Prosedur penanganan pelanggaran harus ditegaskan agar pengawas dapat bertindak cepat dan tepat dalam situasi yang memerlukan respons segera. Selain itu, pengawas juga perlu dibekali keterampilan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di lapangan, baik antara pemilih, calon, atau pihak lain yang terlibat dalam pemilu.

Terakhir, laporan ini menekankan pentingnya penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu. Meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran kinerja yang ditemukan selama periode pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang tetap perlu memantau dan mengevaluasi kinerja pengawas secara berkala.